



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggali Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : HENDRO WIDJANARKO
- Jabatan** : WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJA SAMA
- NHK** : 639873

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.963.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 245 m2/250 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000		
2. Tanah Seluas 326 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 81.500.000		
3. Tanah Seluas 1.579 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 81.500.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	488.000.000
1. MOBIL, HONDA HR-VRUI 1.5 MT CKD Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
2. MOTOR, HONDA TIGER SEPEDA MOTOR Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
4. MOBIL, HONDA CITY HB 1.5L RS CVT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	109.300.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	400.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.960.300.000



III. HUTANG

Rp. 150.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.810.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.